

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN KARANTINA PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NURAINUN SIREGAR**
2. Jabatan : **KEPALA STASIUN**
3. NHK : **882789**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

**695.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
2. Tanah Seluas 257 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 789 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 1538 m2 di KAB / KOTA ASAHAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah Seluas 2680 m2 di KAB / KOTA TAPANULI SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 748 m2 di KAB / KOTA KARIMUN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNGBALAI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

**279.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000



2. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.  
12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	55.118.188
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.047.118.188
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.047.118.188

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.